

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
S O E H A R T O

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1989

DEPARTEMEN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1989



Presiden Republik Indonesia
SOEHARTO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati;
Hadirin yang berbahagia;

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan Salam Sejahtera kepada Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air semuanya, baik yang memperoleh kesempatan untuk hadir dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang semarak ini maupun yang mengikuti persidangan ini dengan penuh perhatian melalui siaran radio dan televisi.

Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan selalu mendatangkan keharuan yang sangat dalam bagi setiap bangsa yang pernah dijajah, apalagi yang terjajah selama ratusan tahun dalam puluhan generasi. Rasa haru yang sangat dalam itu lebih-lebih terasa bagi bangsa kita, yang merebut kemerdekaan ini melalui perjuangan yang sangat panjang dan dengan memberi segala bentuk pengorbanan yang dapat dibayangkan oleh manusia. Perjuangan kemerdekaan kita itu merupakan bagian dari sejarah besar umat manusia

untuk membebaskan diri dari semua bentuk penindasan di muka bumi ini, karena penindasan itu berlawanan dengan martabat manusia.

Setiap kali kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan, seperti yang besok pagi akan kita lakukan, rasa haru kita disertai dengan kebanggaan yang sangat besar. Kita adalah bangsa pejuang, yang merebut dan menegakkan serta mempertahankan kemerdekaan nasional dengan kekuatan sendiri. Pengorbanan yang diberikan dengan ikhlas oleh pendahulu-pendahulu kita tidak terbilang besarnya. Sejarah telah menunjukkan tempat-tempat pembuangan yang mengerikan, penjara-penjara yang mendirikan bulu roma, kisah-kisah kepahlawanan yang mendedarkan jantung dan riwayat penderitaan bangsa yang panjang. Di seantero Tanah Air, kita saksikan makam-makam pahlawan tempat pembaringan abadi kusuma-kusuma bangsa: di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di desa-desa, di lembah-lembah ngarai, di lereng-lereng gunung dan di dasar-dasar laut. Di antara kita yang hidup sekarang ada yang menderita cacat tubuh demi tegaknya Kemerdekaan Nasional, ada janda-janda pejuang kemerdekaan yang dengan penuh ketabahan dan keikhlasan menghadapi perjuangan hidup.

Karena itu, setiap kali kita berada di hari-hari peringatan Kemerdekaan Nasional, kita sampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga dan rasa hormat yang tidak terbatas kepada semua pejuang, pendahulu-pendahulu kita, yang telah menghadap kembali kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Kuasa.

Apabila hari-hari ini, kita mengadakan perbandingan dengan peristiwa yang kita alami di masa lampau, dan juga mengadakan perbandingan dengan peristiwa-peristiwa bergolak yang sedang dialami oleh bangsa-bangsa lain, maka rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberiNya nikmat suasana tenteram dan aman serta kegembiraan di seluruh Tanah Air yang indah ini. Bersamaan dengan rasa syukur itu, bangkit kesadaran kita semua untuk memanfaatkan

kan suasana tenteram dan aman serta penuh kegembiraan tadi untuk meneguhkan kembali tekad nasional dan disiplin nasional guna membawa masyarakat, bangsa dan negara kita untuk mencapai kemajuan yang lebih besar menuju terwujudnya cita-cita nasional, cita-cita kemerdekaan kita.

Saudara Ketua yang saya hormati;

Telah lebih dari dua dasawarsa kita mengembangkan berbagai tradisi baru di bidang politik dan kenegaraan, yang besar manfaatnya bagi perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita selanjutnya. Salah satu dari tradisi itu ialah, paling sedikit dua kali dalam setahun, Presiden Republik ini mendapat kesempatan untuk bertatap muka dan berbicara langsung dengan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Kesempatan yang pertama adalah ketika menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Dewan. Kesempatan yang kedua adalah seperti yang terjadi hari ini, ialah menyampaikan Pidato Kenegaraan menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan yang akan berlangsung pada hari berikutnya. Pada kesempatan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Presiden mengemukakan program nasional yang rinci untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Pada kesempatan menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi, Presiden mengajak bangsa Indonesia untuk mengadakan renungan tahunan yang bersifat nasional mengenai masa lampau, masa sekarang dan masa depan dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita. Pada hari-hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan itulah kita sebagai bangsa mengadakan dialog dengan sejarahnya sendiri.

Setiap kali kita mengadakan renungan dan berdialog dengan sejarah itu, maka secara segar kita akan melihat kembali dari mana kita datang, di mana kita berada sekarang dan ke mana kita hendak melanjutkan perjalanan sejarah ini.

Dengan demikian, setiap tahun, kita selalu mengingatkan diri kita bahwa dalam perjuangan nasional kita terdapat kesinambungan. Agar kesinambungan itu bergerak dinamis sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan zaman, maka kesadaran akan perlunya kesinambungan tadi kita iringi dengan tekad mengadakan pembaharuan terus menerus dari satu tahun ke tahun berikutnya, dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.

Dengan demikian, sekaligus setiap tahun, kita mengingatkan diri kita bahwa hal-hal besar dalam kehidupan bangsa tidak pernah dapat tercapai dalam satu tahun, dalam satu kurun waktu atau dalam satu generasi saja. Hal-hal besar dalam kehidupan bangsa-bangsa, juga dalam kehidupan bangsa dan negara kita, hanya dapat dicapai sebagai hasil perjuangan panjang selama bertahun-tahun, selama beberapa kurun waktu dan oleh beberapa generasi secara berturut-turut dan sambung menyambung.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Renungan kita bersama tahun ini, menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-44, menyadarkan kita semua bahwa tahun ini mempunyai makna yang khas dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita. Sebab, tahun ini kita telah memasuki REPELITA V yang merupakan tahap penutup dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama. Selanjutnya, dengan REPELITA VI nanti kita akan mulai memasuki proses tinggal landas dalam mewujudkan tekad kita untuk membangun masyarakat yang kita cita-citakan; ialah masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

Tahun-tahun di hadapan kita adalah tahun-tahun yang sangat menentukan. Kita harus memantapkan kerangka landasan pembangunan agar tekad untuk tinggal landas itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Dengan memantapkan kerangka landasan pem-

bangunan menuju tinggal landas nanti, dapat kita katakan, bahwa kita menegakkan Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar '45. Sedangkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam proses tinggal landas nanti kita akan membawa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat itu menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

Dilihat dari tanggung jawab generasi, maka pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dalam era tinggal landas nanti pada dasarnya adalah tanggung jawab Generasi Penerus. Generasi Pembebas, Generasi '45, akan mengantarkan bangsa ini ke depan pintu gerbang pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas dalam pembangunan itu. Generasi Pembebas akan merampungkan tugas sejarahnya, bersama dengan Generasi Penerus, agar bangsa ini kelak berhasil dan tidak gagal dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dalam era tinggal landas, apabila Generasi Pembebas secara berangsur-angsur akan meninggalkan pentas sejarah.

Kurun waktu yang dahulu kita masuki dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sedang kita rampungkan, dengan mantapnya landasan pembangunan pada akhir REPELITA V ini. Setelah itu, kita akan segera memasuki kurun waktu yang baru. Karena itu diperlukan wawasan yang baru, guna menjawab tantangan dan masalah-masalah baru yang akan muncul.

Kurun waktu yang baru itu akan kita masuki dalam tahap proses tinggal landas yang akan kita mulai sejak REPELITA VI nanti. Seperti yang saya kemukakan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei yang lalu, dalam kurun waktu tinggal landas nanti kita bertekad untuk menempatkan bangsa dan negara kita sejajar dengan bangsa dan negara lain yang telah maju.

Dalam hubungan inilah Sidang Umum MPR tahun 1993 nanti akan mempunyai arti yang sangat penting. Segenap pemikiran dan

upaya kita dalam memantapkan landasan pembangunan, kita arahkan guna persiapan memasuki proses tinggal landas. Proses tinggal landas dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua itu akan dirumuskan dalam GBHN 1993, yang akan merupakan hasil Sidang Umum MPR 1993 pula.

GBHN 1993 nanti tidak lepas dan tidak merupakan pemutusan terhadap Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama yang dalam beberapa tahun yang akan datang ini akan kita rampungkan. GBHN 1993 nanti terikat oleh kesinambungan, peningkatan dan pembaharuan dengan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama; bahkan dengan perjuangan nasional yang kita jalankan sejak Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945, Revolusi dan Perang Kemerdekaan, kelahiran Orde Baru dalam tahun 1966.

Dalam berbagai kesempatan, juga dalam Pidato-pidato Kene-garaan maupun dalam mengantarkan Rancangan Anggaran Penda-patan dan Belanja Negara di tahun-tahun yang lalu, saya selalu mengingatkan kita semua agar kita tetap memiliki wawasan sejarah dalam membangun dan memajukan semua segi kehidupan masya-rakat, bangsa dan negara kita.

Roda zaman memang terus berputar. Tantangan-tantangan baru muncul, masalah-masalah baru timbul, aspirasi-aspirasi baru dan kekuatan-kekuatan baru akan terus menerus tampil dalam masyarakat kita yang bergerak makin dinamis. Wawasan kita bertambah kaya dan pengalaman kita bertambah banyak. Kita harus belajar dengan sebaik-baiknya dari pengalaman-pengalaman itu, termasuk kesalahan-kesalahannya. Kita harus menyalurkan secara kreatif semua aspirasi dan kekuatan baru yang terus mene-rus muncul dalam masyarakat kita, dengan mengadakan penyesuai-an-penyesuaian yang kita pandang perlu.

Tetapi, dalam mengadakan penyesuaian dan pembaharuan yang terus menerus tadi, kita harus memelihara kesinambungan sejarah antara masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang.

Ada faktor kesinambungan yang sangat mendasar yang kita anggap luhur dan menyatukan kita sebagai bangsa. Faktor kesinambungan yang mendasar itu ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intisari dari faktor kesinambungan yang sangat mendasar ini lah yang tidak boleh berubah. Yang kita lakukan adalah melaksanakan dan mengamalkannya secara kreatif dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang terus menerus muncul dalam perkembangan masyarakat kita dan masyarakat dunia yang sangat dinamis.

GBHN 1993 tentu tidak terlepas dari hasil Pemilihan Umum 1992. Pemilihan Umum 1992 nanti akan kita adakan untuk menyusun DPR dan MPR sebaik-baiknya, sesuai dengan hakikat lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sidang Umum MPR itulah yang akan menetapkan GBHN 1993. GBHN 1993 nanti juga tidak akan terlepas dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Sidang Umum MPR 1993. Presiden yang dipilih oleh Sidang Umum MPR 1993 nanti itu lah yang akan memimpin dan memberi inspirasi kepada bangsa ini dalam melaksanakan GBHN 1993, yang akan merupakan kurun waktu keseluruhan proses tinggal landas dalam pembangunan nasional. Pada gilirannya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu juga tidak terlepas dari mekanisme kepemimpinan nasional, yang akan terus kita mantapkan dalam tahun-tahun mendatang. Termasuk di dalamnya pemantapan fungsi-fungsi, kerjasama, saling hubungan dan pengawasan antara lembaga kepresidenan dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dan dengan MPR.

Dalam pada itu, sebagai bagian dari masyarakat dunia yang makin erat hubungannya satu dengan yang lain, perkembangan kita di Indonesia tidak dapat lepas dari perkembangan di dunia. Perkembangan Indonesia dipengaruhi oleh dan ikut mempengaruhi perkembangan dunia umumnya itu. Sama seperti Indonesia, maka juga di dunia umumnya kita lihat berakhirnya kurun waktu yang

dimasuki setelah selesainya Perang Dunia II di tahun 1945. Di mana-mana sedang muncul wawasan-wawasan baru, aspirasi-aspirasi baru dan kekuatan-kekuatan baru dalam memasuki era baru dari sejarah umat manusia menjelang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

Dalam dunia yang terasa makin kecil dan makin menjadi satu karena hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggih, bangkitlah kesadaran bahwa semua bangsa, tidak ada kecualinya, memikul tanggung jawab bersama mengenai masa depan seluruh umat manusia. Ancaman-ancaman yang dapat memusnahkan umat manusia dan peradabannya hanya dapat diatasi oleh umat manusia secara bersama-sama; seperti ancaman perang nuklir, ancaman kelaparan, ancaman ketidakadilan dan ancaman kerusakan lingkungan hidup.

Pada satu pihak kita melihat tanda-tanda meredanya perang dingin yang berdasarkan pertentangan ideologi dan persaingan di antara sistem-sistem sosial politik dan sosial ekonomi yang berlain-lainan. Pada pihak lain, kita menyaksikan berhembusnya angin baru di Barat, di Utara, di Timur dan di Selatan; yaitu angin yang menyegarkan nilai-nilai moral, etik, spiritual dan keagamaan, angin yang menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan termasuk hak-hak dan kewajiban asasi manusia, angin yang memperkuat solidaritas nasional dan internasional, angin yang menghidup-hidupkan cita-cita kerakyatan, kebebasan dan keterbukaan dan angin yang menyegarkan cita-cita keadilan sosial.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki dihapuskannya segala sesuatu di atas dunia yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan yang ingin menegakkan keterbukaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, adalah sesuai dengan angin segar yang sedang bertiup di Barat, di Utara, di Timur dan di Selatan itu.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Sidang Dewan
yang terhormat;

Tugas yang kita hadapi dalam tahun-tahun mendatang memperlihatkan persamaan, di samping perbedaan, dengan tugas-tugas yang kita hadapi untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan nasional di tahun 1945 dahulu.

Ketika Indonesia merdeka, pendahulu-pendahulu kita telah mengambil intisari akar-akar kepribadian masyarakat kita, telah menggali kembali kepribadian bangsa kita. Pendiri-pendiri Republik ini juga mengambil intisari segala pengalaman pergerakan kemerdekaan kita mulai Kebangkitan Nasional 1908 yang dijadikan kerangka landasan berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk perjuangan selanjutnya; ialah peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat nasional dalam suatu Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Di tahun-tahun yang akan datang, kita juga akan mengambil intisari pengalaman kita bersama sejak tahun 1945 hingga sekarang, untuk memantapkan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Di tahun-tahun yang akan datang itu kita akan mengalami peralihan untuk memasuki era baru, era tinggal landas dalam pembangunan.

Dalam peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat nasional, Pancasila telah menjalankan fungsinya yang sangat penting. Tanpa Pancasila, masyarakat nasional kita tidak akan pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki sekarang ini. Hal ini akan lebih kita sadari jika kita mengadakan perbandingan dengan keadaan masyarakat nasional di banyak negara, yang mencapai kemerdekaannya hampir bersamaan waktu dengan kita.

Dalam peralihan memasuki era tinggal landas, Pancasila juga akan menjalankan fungsinya yang penting. Itulah yang kita ungkapkan dalam tekad kita semua untuk melaksanakan pembangunan kita sebagai pengamalan Pancasila.

Peralihan memasuki era tinggal landas merupakan kurun waktu yang sangat penting, penuh ujian berat dan kritis. Sampai sekarang, ada negara yang gagal dan ada pula negara yang berhasil dalam melewati kurun waktu peralihan yang sangat penting dan kritis itu.

Karena itulah, dalam Pidato Kenegaraan tahun 1984 saya mengingatkan, bahwa kita harus mengembangkan konsep dan model pembangunan kita sendiri, yang kita bangun di atas nilai-nilai kehidupan dan budaya kita sendiri. Kita tidak akan meniruniru begitu saja model pembangunan negara lain yang manapun. Di seluruh dunia, tidak ada satu model pembangunan yang dapat diterapkan begitu saja kepada sesuatu masyarakat.

Dengan model pembangunan kita sendiri seperti itu, kita tidak akan mengadakan pemutusan dengan perjuangan kita di masa lampau. Kita juga tidak akan tercabut dari akar kepribadian kita sendiri dalam peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri yang maju dan berkeadilan sosial. Dengan melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila kita melanjutkan, meningkatkan dan memperbaharui segala hash pembangunan yang kita capai sampai sekarang.

Proses peralihan menuju tinggal landas akan terus menerus melahirkan aspirasi-aspirasi dan kekuatan-kekuatan yang baru. Kegagalan dapat timbul apabila aspirasi-aspirasi dan kekuatan-kekuatan baru itu tidak tersalurkan secara kreatif; atau apabila terjadi persaingan dan saling tabrakan di antara aspirasi-aspirasi dan kekuatan-kekuatan baru tadi.

Dengan melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, kita berusaha mencegah munculnya kedua sumber kegagalan tadi.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, di satu pihak, menyediakan peluang untuk menyalurkan secara kreatif semua aspirasi dan kekuatan yang terus muncul dalam masyarakat yang makin maju, dalam masyarakat industri maju.

Sesungguhnya, di mana pun di dunia ini tidak mungkin dibangun masyarakat industri yang maju dengan sebaik-baiknya apabila nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai solidaritas nasional dan internasional, nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan sosial diabaikan.

Di pihak lain, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila memberi kerangka dan sarana kepada kita sehingga semua aspirasi dan kekuatan-kekuatan yang berlain-lainan yang terus muncul dalam masyarakat yang maju itu dapat diserasikan. Dengan demikian, semua aspirasi dan kekuatan yang baru tidak saling tabrakan, akan tetapi justru saling memperkuat sehingga menjadi satu keseluruhan yang harmonis.

Dengan melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, maka masyarakat industri yang kita bangun dalam era tinggal landas nanti, tidak meniru begitu saja masyarakat industri maju yang telah ada sekarang ini. Kita membangun masyarakat industri maju yang tetap mengungkapkan kepribadian dan cita-cita perjuangan nasional kita sendiri, seperti yang telah kita abadikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian jelas tugas utama kita di tahun-tahun yang akan datang adalah memantapkan kerangka landasan bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju proses tinggal landas.

Untuk melaksanakan tugas besar itu kita memerlukan pemikiran-pemikiran yang kreatif di semua bidang. Segenap kalangan, lapisan dan golongan masyarakat kita dari semua generasi harus mengembangkan pemikiran-pemikiran besar yang kreatif itu: kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, kalangan cerdik cendekia, kalangan pendidikan, kalangan budaya dan seni-man, kalangan agama, kalangan dunia usaha, kalangan pers dan semuanya saja.

Itulah sebabnya, beberapa tahun yang lalu saya kemukakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Dengan memandang

Pancasila sebagai ideologi terbuka maka kita dapat mengembangkan pemikiran baru yang segar dan kreatif untuk mengamalkan Pancasila dalam menjawab perubahan dan tantangan zaman yang terus bergerak dinamis. Nilai-nilai dasar Pancasila tidak boleh berubah. Sedangkan pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu. Pendahulu-pendahulu kita, para perancang Undang-Undang Dasar 1945, telah mengingatkan agar kita memperhatikan sungguh-sungguh dinamika masyarakat. Para pendiri Republik ini, sejak semula, hanya menetapkan aturan pokok yang dasar-dasarnya diletakkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua yang hidup kemudian diberi peluang untuk mengembangkan pelaksanaannya secara luas, Karena itulah kita berkeyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita yang kukuh dan sekaligus kenyal. Karena itu pula tepat sekali ketetapan MPR yang menegaskan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus kita amankan secara berlapis-lapis, yang diawali dengan meminta pendapat rakyat melalui referendum terlebih dahulu apabila MPR berkehendak untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945.

Pemantapan kerangka landasan di bidang politik memerlukan perhatian kita yang sebesar-besarnya. Pengalaman dari semua negara berkembang membuktikan, bahwa pembangunan politik yang diabaikan dapat merupakan sumber bagi kelambatan dan kemunduran, bahkan dapat menggagalkan seluruh pembangunan menuju tinggal landas. Sebaliknya, pembangunan politik yang terlalu jauh mendahului kemajuan pembangunan di bidang lainnya, juga dapat merupakan sumber bagi munculnya berbagai kesulitan dan permasalahan yang mengganggu kemajuan dalam pembangunan. Yang kita perlukan adalah pertumbuhan dan perkembangan Demokrasi Pancasila yang bergerak maju seiring dengan kemajuan di bidang-bidang lain; dan yang terus menerus

mampu menjamin stabilitas nasional, pertumbuhan yang dinamis, persatuan dan kesatuan bangsa, terpeliharanya keamanan nasional dan meningkatnya ketahanan nasional.

Dalam rangka itulah saya melihat berkembangnya dialog-dialog nasional mengenai berbagai hal di bidang politik yang memenuhi pikiran kita dalam beberapa bulan terakhir ini. Marilah kita endapkan semua pikiran dan aspirasi-aspirasi politik yang telah terungkapkan itu dengan hati yang setenang-tenangnya, dengan pikiran yang sejernih-jernihnya dan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Segala pikiran dan proses kemajuan yang kita inginkan hendaklah kita capai dengan sadar dan dengan rencana yang cermat, dengan arah yang jelas dan dengan irama yang tepat.

Pemantapan kerangka landasan di bidang ekonomi juga akan memperoleh perhatian yang sebesar-besarnya. Demi terwujudnya pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial, kita tetap memerlukan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang cukup besar di bidang ekonomi. Kita menamakannya sebagai Trilogi Pembangunan. Malahan seluruh pembangunan ekonomi itu kita letakkan dalam pemikiran yang menyeluruh dari pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Ini berarti pembangunan dan kehidupan ekonomi harus kita kaitkan dengan pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan pengamalan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan pengamalan Sila Persatuan Indonesia, dengan pengamalan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan dengan pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Itulah sebabnya, bulan yang lalu, saya meminta kepada pimpinan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, agar memikirkan penjabaran yang lebih luas dan lengkap mengenai Demokrasi Ekonomi yang kita kembangkan berdasarkan Pancasila. Kita semua berharap agar pemikir-pemikir kita di bidang ekonomi dapat mengembangkan pemikiran mengenai Demokrasi Ekonomi

itu; yang di satu pihak, memiliki integritas ilmiah secara universal, dan di lain pihak, dikaitkan dengan pengamalan semua Sila dalam Pancasila selaku kesatuan yang utuh. Tentu saja pemikiran kita mengenai Demokrasi Ekonomi bukanlah semata-mata milik para sarjana ekonomi. Pada tingkat terakhir, pemikiran kita mengenai Demokrasi Ekonomi adalah pemikiran politik, pemikiran seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang dijelmakan oleh MPR. Dalam rangka itu, pemikiran sarjana-sarjana ekonomi kita yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia akan merupakan salah satu sumbangan pikiran yang besar manfaatnya.

Pemantapan kerangka landasan di bidang budaya juga memerlukan perhatian kita yang tidak kalah besarnya di tahun-tahun yang akan datang. Seperti yang diisyaratkan oleh GBHN 1988, peralihan menuju ke masyarakat industri yang maju memerlukan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Bagi kita, perubahan nilai-nilai itu tidak berarti kita akan tercabut dari akar-akar kebudayaan kita yang telah berabad-abad lamanya. Tetapi itu juga tidak berarti kebudayaan kita akan dapat bertahan begitu saja dalam masyarakat industri yang akan datang. Kebudayaan kita yang lama itu harus mengalami perubahan-perubahan dan membuka diri terhadap kerjasama dan persaingan dengan kebudayaan maju yang lain di dunia ini. Dengan demikian akan lahir kebudayaan Indonesia yang tidak kalah moderennya dengan kebudayaan-kebudayaan moderen yang lain, akan tetapi di samping itu, tetap mengungkapkan kepribadian dan cita-cita perjuangan nasional kita, yang kita abadikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang saya maksud, ketika di sekitar tahun 70-an saya mengingatkan kita semua, bahwa dengan membangun kita memang bertekad untuk menjadikan Indonesia yang moderen; akan tetapi dalam kemoderennya itu kita tetap berkepribadian Indonesia.

Pemantapan kerangka landasan di bidang pendidikan nasional sangat penting bagi kita di tahun-tahun yang akan datang. Pengalaman negara-negara berkembang yang berhasil mencapai

tinggal landas menunjukkan, bahwa umumnya mereka bukan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam; tetapi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdedikasi tinggi. Semuanya itu merupakan hasil dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional di negara mereka. Karena itu untuk berhasil dalam proses tinggal landas nanti, maka salah satu syarat utamanya adalah pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, berdedikasi tinggi dan berdisiplin tinggi. Kita bersyukur bahwa 44 tahun setelah Indonesia merdeka, yang dalam alam kemerdekaan itu bertekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita telah memiliki undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional.

Pemantapan kerangka landasan di bidang hukum juga memerlukan perhatian kita yang besar. Hal itu merupakan upaya kita untuk lebih memantapkan ciri dan hakikat negara kita sebagai negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan semata-mata, suatu sikap yang sejak berdirinya negara ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk pemantapan kerangka landasan di bidang hukum ini adalah langkah-langkah di berbagai bidang yang diperlukan guna memberi kepastian hukum dan rasa keadilan. Pemikiran kita di bidang hukum dan pembangunan di bidang hukum pada umumnya, dengan sendirinya akan tetap bergerak dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dalam rangka Wawasan Nusantara dan dalam rangka penegasan kita mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semuanya tadi harus mengungkitkan pendirian kita yang teguh bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.

Pemantapan kerangka landasan dalam kehidupan keagamaan juga memerlukan perhatian kita semua. Di banyak negara yang sedang membangun kita lihat bahwa masalah keagamaan sering menjadi sumber bagi hambatan dan gangguan dalam pembangunan

menuju tinggal landas. Kita di Indonesia yang memiliki Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, menempatkan rasa keagamaan kita sebagai sumber kekuatan dalam upaya kita untuk menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Di bidang kehidupan keagamaan ini kerukunan hidup antara umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, ialah tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual bagi pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, seperti yang telah kita tegaskan dalam GBHN 1988. Untuk melaksanakan tanggung jawab bersama itu, di tahun-tahun yang akan datang, para pemikir dan pemuka dari semua golongan agama akan mengembangkan pemikiran yang kreatif, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan tetap setia kepada iman yang mereka yakini masing-masing.

Perhatian kita yang besar juga tetap kita berikan pada peman-tapan kerangka landasan di bidang pertahanan keamanan. Peredaan ketegangan dunia dan suasana aman di dalam negeri kita memanfaatkan sebaik-baiknya guna terus mengkonsolidasikan kekuatan ABRI dan peningkatan kemampuan profesional, dengan tetap menempa ABRI sebagai prajurit pejuang dan tanpa meng-endorkan kewaspadaan. Peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik diarahkan agar terus menerus dapat ikut menumbuhkan, memperkuat dan menyegarkan kehidupan demokrasi Pancasila.

Segala aspirasi dan pemikiran kita mengenai proses tinggal landas nanti akan kita bulatkan dalam Sidang Umum MPR 1993 dalam bentuk GBHN 1993.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawas-an sejarah, yang menjaga kesinambungan dan membuka diri terhadap pembaharuan, maka bersamaan dengan pemikiran dan langkah-langkah kita untuk mengatasi masalah-masalah nyata

yang kita hadapi setiap saat sebagai bangsa, kita juga harus mengembangkan pemikiran-pemikiran kita mengenai arah yang akan kita tempuh dalam jangka panjang.

Dalam rangka itu pula, sejak awal, selaku Presiden/Mandataris Majelis, saya telah menugasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional untuk menyiapkan bahan-bahan mengenai GBHN 1993. Sama halnya dengan praktek penyelenggaraan negara yang telah kita kembangkan selama ini, bahan-bahan GBHN 1993 nanti juga merupakan sumbangan pikiran dari Presiden/Mandataris kepada Sidang Umum MPR yang akan datang. Adalah wenang sepenuhnya dari Majelis untuk memperlakukan bahan-bahan sumbangan pikiran dari Presiden/Mandataris: akan menggunakannya sebagai bahan dalam menyusun GBHN 1993, akan mengubahnya, akan merombaknya atau tidak akan menggunakannya sama sekali. Satu-satunya alasan penyampaian sumbangan pikiran itu adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis yang sangat penting dan menentukan perjalanan kita sebagai bangsa. Praktek penyelenggaraan negara berupa sumbangan pikiran mengenai bahan GBHN dari Presiden/Mandataris itu berkembang karena pengalaman sejarah. Dalam Sidang Umumnya di tahun 1968, MPR(S) tidak dapat merampungkan penyusunan GBHN, sehingga menugasi Presiden/Mandataris untuk menyusun REPELITA sendiri tanpa GBHN.

Tentu saja, sesuai dengan semangat penyusunan GBHN yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945, Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional juga telah berusaha menampung semua aspirasi yang muncul dalam masyarakat, membuat perkiraan-perkiraan strategis jangka panjang dalam ruang lingkup nasional maupun internasional serta meneliti kendala yang ada dan peluang yang terbuka. Dalam menyiapkan bahan-bahan tadi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional mengikutsertakan secara aktif perguruan tinggi negeri maupun swasta, tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka masya-

rakat dan kalangan pemerintahan. Penyusunan bahan-bahan GBHN yang demikian itu telah merupakan bagian dari proses demokrasi tersendiri. Dengan itu GBHN tidak hanya akan merupakan kumpulan dari daftar panjang keinginan, melainkan telah dapat kita rangkum menjadi strategi pembangunan yang realistis dan bertanggung jawab.

Sumbangan pikiran Presiden/Mandataris mengenai bahan-bahan GBHN bagi Sidang Umum MPR itu bukan "monopoli" Presiden. Kekuatan-kekuatan sosial politik dapat berbuat yang sama, ialah sejak dini mulai mengumpulkan bahan dan jika perlu menyusunnya dalam Rancangan GBHN yang dapat dibekalkan kepada fraksinya dalam Sidang Umum MPR nanti.

Penetapan GBHN merupakan mata rantai yang penting dari mekanisme kepemimpinan nasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, yang diawali oleh Pemilihan Umum. Pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah kita laksanakan secara teratur sejak kita membangun Orde Baru, yang merupakan pelaksanaan yang penting dari pembangunan politik dan menjadi kunci dari pemantapan stabilitas nasional.

Pemilihan Umum itu kita laksanakan sejiwa dengan kehendak pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilihan Umum itu lah yang menghasilkan susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pelaksanaan Pemilihan Umum, susunan Dewan dan susunan Majelis telah kita tetapkan melalui undang-undang. Dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan proses kemajuan dalam kehidupan politik serta demokrasi, undang-undang mengenai Pemilihan Umum serta susunan Dewan dan Majelis itu telah kita sempurnakan dari waktu ke waktu. Sampai sekarang, undang-undang mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum serta susunan Dewan dan Majelis kita tetapkan berdasarkan konsensus nasional. Konsensus nasional itu kita

sepakati setelah kita bersama-sama memperhatikan dengan sungguh-sungguh pandangan semua pihak dan setelah kita bersama-sama mengadakan penilaian mengenai keadaan kita. Dengan mempertimbangkan semua segi tadi, maka sampai sekarang ini setiap kali kita telah mencapai konsensus nasional mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum serta susunan DPR dan MPR yang kita anggap paling baik, dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen di tengah-tengah tingkat perkembangan sejarah di mana kita berada.

Kalau ada kekuatan sosial politik yang memandang ada sistem Pemilihan Umum yang lebih baik dari yang kita sepakati sampai sekarang, maka tidak ada halangan untuk memperjuangkan pandangannya itu. Yang penting adalah tercapainya konsensus nasional, yang nanti kita kukuhkan dengan undang-undang.

Selain menetapkan GBHN, maka Sidang Umum MPR 1993 nanti juga akan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 1993-1998. Ada kaitan yang erat antara penetapan GBHN dan pemilihan Presiden. Presiden sebagai Mandataris yang dipilih harus bersedia dan dianggap paling mampu melaksanakan sebaik-baiknya GBHN yang telah ditetapkan.

Walaupun pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis dengan suara terbanyak, namun berkembang pandangan yang luas di kalangan masyarakat bahwa lebih baik bagi masyarakat, bangsa dan negara kita apabila penetapan GBHN serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terutama dalam mengambil keputusan mengenai hal yang sangat mendasar dan menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa dan negara kita secara keseluruhan, kita menganggap pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat lebih unggul mutunya daripada melalui pemungutan suara. Sesuai dengan faham negara kekeluargaan yang menjiwai se-

luruh pemikiran Undang-Undang Dasar 1945, yang menghendaki agar negara mengatasi segala paham perorangan atau paham golongan, maka musyawarah untuk mencapai mufakat menjamin diperhatikannya semua aspirasi dan kepentingan lapisan dan golongan dalam masyarakat kita. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, akan menjamin bahwa yang "kecil" tidak akan selalu dikalahkan oleh yang "besar". Apabila musyawarah telah diusahakan sekuat tenaga, namun mufakat tidak tercapai juga karena pandangan yang berbeda kurang lebih sama kuatnya, maka barulah kita ambil jalan terakhir melalui pemungutan suara.

Bagian penting lainnya dari keseluruhan mekanisme kepemimpinan nasional adalah kekuatan-kekuatan sosial politik, terutama karena mereka ikut serta dalam Pemilihan Umum yang akan menentukan susunan DPR dan MPR. Kehidupan demokrasi kita akan makin-segar, makin dewasa dan makin kuat, jalannya mekanisme kepemimpinan nasional akan makin lancar, apabila kekuatan-kekuatan sosial politik ini juga makin kuat dan mandiri dalam rangka pelaksanaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan demokrasi kita secara nasional akan segar, apabila kehidupan demokrasi dalam kekuatan-kekuatan sosial politik itu juga tumbuh dengan segar.

Pemantapan mekanisme kepemimpinan nasional merupakan upaya kita yang sangat penting di tahun-tahun mendatang untuk memantapkan kerangka landasan pembangunan nasional sebagai anjang-ancang untuk memasuki proses tinggal landas. Pengalaman banyak bangsa menunjukkan, bahwa ketidakberhasilan mereka dalam memantapkan mekanisme kepemimpinan nasional, termasuk di dalamnya ketidakberhasilan dalam memantapkan sistem pengawasan, sering menjadi sumber dari ketidakstabilan nasional yang berkepanjangan. Sehingga ada negara yang telah mencapai kemerdekaan nasionalnya lebih dari 100 tahun, negara itu belum

juga mencapai kemajuan yang berarti dalam pembangunan nasionalnya. Kita bertekad agar pengalaman seperti itu tidak akan terjadi di Indonesia dalam dasawarsa-dasawarsa yang akan datang, bahkan dalam abad-abad yang akan datang.

Dengan memantapkan kerangka landasan pembangunan nasional, termasuk memantapkan mekanisme kepemimpinan nasional, dengan melaksanakan Pemilihan Umum 1992 sebaik-baiknya, dengan menetapkan GBHN 1993 yang realistis dan menjamin kemajuan yang berkeadilan di masa datang, dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 1993-1998, maka Insya Allah, bangsa kita akan benar-benar siap memasuki proses tinggal landas dalam pembangunan mulai REPELITA VI yang akan datang.

Para Anggota Dewan yang terhormat;

Pusat perhatian dan kegiatan kita yang tercurah pada pematangan landasan pembangunan sebagai persiapan memasuki proses tinggal landas, kita sertai dengan pelaksanaan tanggung jawab kita atas perkembangan dunia.

Seperti saya singgung tadi, dalam tahun-tahun belakangan ini timbul perkembangan dan perubahan-perubahan mendasar dalam perkembangan internasional, yang antara lain ditandai oleh gerak saling pendekatan antar negara, khususnya antara negara-negara besar di dunia. Perkembangan ini tidak saja telah dapat mengurangi ketegangan Timur — Barat, tetapi telah juga membuka kesempatan baru bagi upaya mencari penyelesaian damai terhadap berbagai konflik regional.

Terciptanya suasana baru dalam hubungan internasional itu kita sambut dengan gembira. Namun, hal ini tidak menutup kenyataan bahwa keadaan internasional masih tetap rawan dan serba tidak menentu. Hubungan antar negara masih diwarnai oleh berbagai bentuk ketidakadilan, ketegangan dan campur tangan, khususnya oleh negara-negara besar dan kuat terhadap yang lemah dan

kecil. Di kawasan-kawasan tertentu masih bercokol sisa-sisa kolonialisme dan rasialisme yang merintangai hasrat universal bangsa-bangsa untuk mencapai kemerdekaan sejati, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Perekonomian dunia tetap mengalami gejolak yang berkepanjangan. Hubungan antara negara maju dan negara berkembang masih menunjukkan ketimpangan-ketimpangan yang sangat menyolok. Bahkan, akhir-akhir ini tampak bertumbuhnya pengelompokan-pengelompokan antara negara-negara maju, yang perlu dipantau terus arah perkembangannya, karena berpotensi membawakan dampak negatif terhadap kepentingan negara-negara berkembang.

Bagi Indonesia, membaiknya suasana internasional yang dapat lebih menjamin keamanan, kestabilan dan kerjasama saling menguntungkan di dunia merupakan kesempatan baik bagi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional kita. Sebaliknya, setiap perubahan atau gejolak dunia yang dapat menghambat pembangunan kita terus kita amati secara cermat, agar kita dapat sedini mungkin meredam atau mencegah pengaruh negatifnya. Dalam rangka inilah, Indonesia selama tahun yang silam telah berperan aktif dalam memberi sumbangan bagi terwujudnya dunia yang lebih damai dan adil; dan bagi penyelesaian berbagai masalah regional maupun internasional.

Pada tingkat regional, kita tetap memandang ASEAN sebagai wadah kerjasama yang menduduki tempat utama dalam politik luar negeri Indonesia. Dalam upaya mengembangkan kerjasama ekonomi, politik dan sosial budaya demi kesejahteraan dan kemajuan sesama negara anggotanya, ASEAN telah berhasil mencatat kemajuan-kemajuan nyata.

Upaya menyumbang pada suatu penyelesaian damai terhadap kemelut di Kamboja, yang sampai saat ini merupakan ganjalan bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, kini mulai menunjukkan titik-titik terang. Terselenggaranya Pertemuan-pertemuan Informal Jakarta, telah menerobos kebekuan

bertahun-tahun dalam upaya ke arah penyelesaian kemelut di sana yang membawa penderitaan dan membuka jalan bagi Konperensi Internasional mengenai Kamboja yang kini tengah berlangsung di Paris. Namun berhasil tidaknya segala daya upaya tadi, pada akhirnya, tergantung pada itikad serta tekad yang berpandangan jauh dari pihak-pihak yang langsung terlibat. Indonesia berharap agar pihak-pihak Kamboja serta negara-negara yang berkepentingan lainnya dapat menunjukkan keluwesan dalam menjembatani perbedaan-perbedaan antara mereka, sehingga Konperensi Paris dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang menyeluruh, adil dan langgeng, yang pada gilirannya akan merupakan sumbangan penting bagi tercapainya perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.

Sementara itu, dalam proses menuju normalisasi hubungan diplomatik antara RI dan RRC kini telah dicapai suatu titik kejelasan. Sekarang, telah diperoleh kesepakatan dan penegasan resmi dari pihak RRC bahwa hubungan antara kedua negara akan sepenuhnya didasarkan pada Dasa Sila Bandung dan lima prinsip hidup berdampingan secara damai. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan wajar Indonesia, yaitu agar tidak ada campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing, baik pada tingkat Pemerintah maupun pada tingkat antar rakyat atau partai, sekarang telah terpenuhi. Persiapan dan perembukan lebih lanjut antara kedua pihak sedang berlangsung sampai pada saat yang baik untuk mewujudkan normalisasi tersebut.

Sebagai kawasan yang berbatasan dengan Indonesia dan ASEAN, kita berkepentingan akan adanya ketenteraman dan kestabilan di Pasifik Selatan. Karena itu kita berhasrat terus mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan ini, antara lain melalui kerjasama ekonomi dan teknik yang selama ini telah terjalin.

Perkembangan di wilayah Pasifik umumnya, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang demikian pesat dan terdapat sejumlah mitra ekonomi utama kita, memang memerlukan perhatian

kita yang semakin meningkat. Maka dari itu, Indonesia bersikap terbuka terhadap usul-usul serta gagasan-gagasan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara Pasifik, asalkan peningkatan itu tetap bertujuan mempertahankan sistem ekonomi dunia yang terbuka dan tidak diarahkan untuk membentuk suatu blok perdagangan tertutup. Lagi pula, peningkatan kerjasama ekonomi Pasifik harus dapat memenuhi aspirasi serta kepentingan dasar negara-negara berkembang seperti Indonesia dan jangan sampai mengurangi arti penting ASEAN, malah sebaliknya harus mendukung kerjasama ASEAN serta memanfaatkan mekanisme yang sudah ada dalam kerangka ASEAN.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Sekarang, marilah kita melihat perkembangan ekonomi kita dan hasil-hasil pembangunan yang telah kita capai bersama.

Sesuai amanat GBHN, pada waktu kita mengakhiri REPELITA IV beberapa bulan yang lalu, struktur ekonomi kita makin seimbang pada tingkat yang tinggi. Selangkah demi selangkah kita dapat membangun industri yang kuat dengan dukungan pertanian yang tangguh.

Produksi pertanian dapat kita tingkatkan, sementara swasembada beras yang telah kita capai beberapa tahun yang lalu dapat terus kita mantapkan. Kita juga berhasil meningkatkan pembangunan yang menyangkut kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, gizi, keluarga berencana, pemukiman, transmigrasi, pembangunan daerah dan sebagainya. Perekonomian kita juga makin kukuh dengan jaringan prasarana yang bertambah luas dan kegiatan ekonomi yang makin berkembang.

Memang, REPELITA IV yang baru lalu merupakan tahun-tahun yang penuh hikmah; baik dari kemajuan-kemajuan yang kita capai maupun dari ujian-ujian berat yang kita hadapi.

Memasuki dasawarsa 70-an, di tengah-tengah kita melaksanakan pembangunan, dunia dilanda resesi yang cukup parah dan ber-

langsung cukup lama. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia merosot dan harga minyak bumi terus melemah. Pada waktu itu kita menyadari bahwa perekonomian dunia sedang mengalami perubahan besar. Kita perlu menyesuaikan diri dengan arus perubahan itu. Kita juga menyadari bahwa masih ada kelemahan yang mendasar dalam perekonomian kita, yaitu ketergantungannya pada minyak bumi sebagai sumber utama penerimaan devisa dan penerimaan negara. Tantangan ini harus dijawab.

Demikianlah, sewaktu kita memasuki REPELITA IV keadaan perekonomian dunia penuh dengan ketidakpastian dan harapannya tidak terlalu cerah. Namun kita telah bertekad untuk melaksanakan amanat GBHN sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya. Tujuan ganda dari REPELITA IV, yaitu meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat dan meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan selanjutnya, harus dicapai. Kerangka landasan untuk persiapan menuju tahap tinggal landas harus diciptakan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah digariskan tadi, dalam suasana seperti itu, kita telah menentukan arah kebijaksanaan yang jelas, yaitu menggali dan mengembangkan sumber-sumber dana pembangunan dari dalam negeri, terutama yang berasal dari sumber-sumber di luar minyak dan gas bumi. Dalam hubungan inilah, dalam REPELITA IV kita telah berupaya habis-habisan untuk meningkatkan ekspor non migas. Dalam rangka ini pula kita menyadari bahwa penerimaan dalam negeri, terutama yang berasal dari pajak, mutlak harus kita tingkatkan. Dalam kaitan ini pulalah, sumber-sumber dana masyarakat harus dikerahkan lebih efektif melalui perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Semua ini memerlukan langkah-langkah pembaharuan yang terarah dan terencana di berbagai bidang yang terkait.

Karena itulah, menjelang dimulainya pelaksanaan REPELITA IV kita melakukan pembaharuan yang mendasar di sektor keuang-

an, berupa langkah deregulasi di bidang perbankan pada pertengahan tahun 1983. Kebijakan ini merupakan landasan bagi rangkaian langkah kebijaksanaan di bidang keuangan yang kita ambil kemudian. Hasil-hasilnya ternyata sangat menggembirakan. Dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya telah meningkat dengan pesat. Selama REPELITA IV dana yang dapat dihimpun oleh perbankan telah meningkat hampir tiga kali lipat: dari Rp. 13,3 trilyun menjadi Rp. 39,5 trilyun. Jumlah kredit yang disalurkan untuk berbagai kegiatan ekonomi juga terus meningkat. Apabila pada akhir REPELITA III jumlah kredit perbankan baru mencapai Rp. 16,1 trilyun, maka pada akhir REPELITA IV mencapai Rp. 46,5 trilyun. Sektor perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lain makin bergairah dan jangkauan pelayanannya juga makin meluas, terutama setelah dilaksanakannya kebijaksanaan Oktober 1988. Sementara itu, pasar modal juga mulai menunjukkan perkembangan awal yang positif sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Semua ini menunjukkan bahwa pola dan tatacara penghimpunan dana masyarakat makin berkembang.

Kebutuhan dana pembangunan untuk membiayai berbagai proyek yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah seperti pembangunan prasarana, kesehatan, pendidikan, pembangunan daerah dan lain sebagainya, juga terus meningkat. Untuk itu kita melaksanakan pembaharuan menyeluruh dari sistem perpajakan.

Hasil dari langkah-langkah pembaharuan tadi sangat membesarkan hati. Penerimaan dalam negeri Pemerintah dari sumber-sumber non migas meningkat dari Rp. 4,9 trilyun pada akhir REPELITA III menjadi Rp. 13,5 trilyun pada tahun terakhir REPELITA IV. Atau, penerimaan dalam negeri dari sumber-sumber non migas itu naik dari 34% pada akhir REPELITA III menjadi kira-kira 59% dari seluruh penerimaan dalam negeri Pemerintah pada tahun terakhir REPELITA IV. Hal ini merupakan perkembangan yang mendasar dalam struktur penerimaan

negara kita dan mutlak perlu terus ditingkatkan untuk makin mengembangkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan.

Dinamika pembangunan memerlukan langkah-langkah pembaharuan tidak hanya di bidang keuangan dan perpajakan, tetapi juga di berbagai bidang lain, termasuk bidang perdagangan, perhubungan, penanaman modal dan sebagainya. Dalam hubungan ini serangkaian langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang luas cakupannya telah kita ambil. Hasil-hasil dari langkah-langkah ini antara lain telah berhasil meningkatkan sangat pesat ekspor non migas. Apabila pada tahun terakhir REPELITA III ekspor non migas baru mencapai 5,4 milyar dolar Amerika Serikat atau sekitar 27% dari seluruh nilai ekspor, maka pada tahun terakhir REPELITA IV ekspor non migas kita telah mencapai lebih dari 12 milyar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 60% dari seluruh nilai ekspor.

Sementara itu, minat untuk menanamkan modal, baik penanam modal dalam negeri maupun dari penanam modal asing, juga sangat meningkat terutama selama 2 tahun terakhir ini, sebagai hasil dari langkah-langkah kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, di samping adanya perkembangan-perkembangan yang menguntungkan Indonesia di luar negeri. Selama REPELITA I sampai sekarang, penanaman modal dalam negeri mencapai lebih dari Rp. 69 trilyun, yang menghasilkan hampir 5.500 buah proyek pembangunan. Di samping itu telah dibangun pula lebih dari 1.200 proyek dari penanaman modal asing senilai hampir 26 milyar dolar Amerika Serikat, yang jika dinilai dengan kurs yang berlaku sekarang nilainya sekitar Rp. 46 trilyun. Ini berarti bahwa nilai penanaman modal asing sekitar 40% dari seluruh investasi swasta. Dilihat dari jumlah proyeknya, jumlah proyek penanaman modal asing itu sekitar 18% dari seluruh proyek penanaman modal. Dari angka-angka tadi terbukti bahwa investasi modal swasta dari dalam negeri sendiri lebih besar dari investasi modal

swasta asing. Perkembangan ini sesuai dengan amanat GBHN, ialah pengerahan modal dari luar merupakan pelengkap dari dana-dana dalam negeri. Perlu saya tambahkan bahwa seluruh investasi swasta masih lebih besar lagi, karena angka-angka tadi hanya mencakup investasi swasta dalam rangka undang-undang penanaman modal.

Kalau kita lihat perkembangan empat REPELITA, maka tampak bahwa selama REPELITA I dan II modal swasta dalam negeri dan swasta asing tadi ditanamkan pada industri hilir atau kegiatan yang menghasilkan barang-barang pengganti impor. Dalam REPELITA III mulai memasuki sektor-sektor yang menghasilkan barang modal, bahan baku dan penolong. Sedangkan dalam REPELITA IV kegiatannya terarah pada barang-barang untuk pasaran ekspor. Apabila dalam tahun 1986 sekitar 45% dari penanaman modal diarahkan pada industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, maka dalam tahun 1988 sekitar 72% kegiatan penanaman modal swasta itu diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan barang-barang ekspor. Momentum yang baik dari penanaman modal ini perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya.

Sejalan dengan perkembangan tadi kita dapat mencatat beberapa perkembangan penting lainnya. Hasil-hasil industri dalam negeri mulai dapat menjadi sumber utama dari peningkatan ekspor non migas. Jika pada tahun terakhir REPELITA III hasil-hasil industri mencakup 63,4% dari penerimaan ekspor non migas, maka pada akhir REPELITA IV hasil-hasil tersebut meliputi hampir 80% dari penerimaan ekspor non migas.

Peranan sektor industri juga makin menonjol dalam produksi nasional. Industri dalam negeri telah dapat berkembang pesat selama REPELITA IV. Atas dasar data terbaru yang dikumpulkan dari Sensus Ekonomi Nasional 1986 dan survei-survei lain, sektor industri telah tumbuh dengan laju rata-rata 13,2% setiap tahun selama periode 1983-1988. Angka ini melampaui sasaran REPELITA IV untuk sektor ini sebesar rata-rata 9,5% setiap tahun.

Sejalan dengan itu, sumbangan sektor industri dalam produksi nasional juga telah meningkat dari 12,7% menjadi 18,4%. Perkembangan ini mempertebal keyakinan kita bahwa sektor industri akan dapat menjadi penggerak utama pembangunan di tahun-tahun mendatang. Perkembangan ini juga membuktikan bahwa sektor industri ternyata mampu memanfaatkan peluang yang terbuka dan mampu berkembang pesat dalam iklim usaha yang wajar, tanpa harus dimanjakan.

Sektor pertanian juga telah tumbuh dengan memadai, yaitu dengan rata-rata 3,5% setiap tahun selama REPELITA IV, yang berarti melampaui sasaran yang ditetapkan sebesar rata-rata 3% setiap tahun.

Demikianlah, selama pelaksanaan REPELITA IV kita telah berhasil melangkah maju lagi dalam upaya kita untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh.

Dalam pada itu, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam REPELITA IV ternyata juga cukup memadai. Atas dasar perkiraan sementara, laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu itu mencapai rata-rata 5,1% setiap tahun atau sedikit di atas sasaran REPELITA IV sebesar 5% setiap tahun. Terutama setelah tahun 1985, perekonomian Indonesia bangkit kembali secara mantap dan pada tahun 1988 mencapai laju pertumbuhan sebesar 5,7%. Apabila kita melihat bagian perekonomian kita yang merupakan sumber mata pencaharian langsung bagi lapisan terbesar rakyat kita, ialah sektor-sektor ekonomi di luar minyak dan gas bumi, maka laju pertumbuhannya lebih tinggi lagi yaitu rata-rata 5,9% setiap tahun selama REPELITA IV. Dalam tahun 1988 kelompok sektor-sektor non migas ini telah tumbuh dengan 7,4%. Perlu saya jelaskan bahwa angka laju pertumbuhan ini didasarkan atas perhitungan kembali Produk Domestik Bruto Indonesia sejak tahun 1983 dengan menggunakan data terbaru,

khususnya data untuk sektor industri yang disebutkan di atas, di samping perhitungan kembali untuk beberapa sektor lain.

Selama REPELITA IV laju inflasi dapat ditekan pada tingkat rata-rata 6,6% setiap tahun. Pengendalian inflasi tadi jauh lebih berhasil jika dibanding dengan REPELITA III yang mencapai rata-rata 13,2% setiap tahun. Hal ini berkat tersedianya secara cukup dan lancarnya distribusi berbagai barang-barang kebutuhan pokok serta berkat keteguhan hati kita untuk tetap berpedoman pada kebijaksanaan anggaran belanja berimbang dan kebijaksanaan moneter yang berhati-hati.

Sementara itu, selama REPELITA IV, neraca pembayaran kita mengalami tekanan-tekanan berat sebagai akibat dari merosotnya harga minyak waktu itu dan kenaikan kurs berbagai mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat. Pada bulan September 1986 kita terpaksa melakukan devaluasi untuk mengamankan neraca pembayaran kita dari gejala-gejala spekulatif di bursa valuta asing dan dari dampak penurunan drastis harga minyak yang terjadi selama 8 bulan pertama tahun tersebut. Langkah devaluasi tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekspor non migas Indonesia. Dengan langkah-langkah pengamanan tersebut dan terutama dengan makin meningkatnya ekspor non migas kita, situasi neraca pembayaran tetap terkendali dengan baik dan makin mantap.

Sidang Dewan yang terhormat;

Dalam pada itu, dengan sadar kita pelihara keutuhan fungsi sumber alam dalam menopang pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini didorong oleh tanggung jawab kita untuk memelihara kelestarian lingkungan alam; tidak saja untuk kepentingan kita yang hidup di zaman ini tetapi juga untuk generasi-generasi di zaman yang akan datang.

Tanggung jawab kita itu juga didorong oleh kesadaran penuh bahwa sumber alam dan lingkungan hidup tidak hanya penting

bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga penting bagi umat manusia penghuni bumi ini. Itulah sebabnya, kita terus menerus mendesak negara-negara industri yang telah sekian lama menikmati manfaat sumber alam Indonesia serta sumber alam negara-negara berkembang lainnya untuk membuktikan sikap tanggung jawab mereka dalam mengatasi masalah lingkungan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di samping itu kita juga berkewajiban untuk mengingatkan negara-negara maju akan tanggung jawab mereka untuk dengan sungguh-sungguh mengatasi sumber-sumber ancaman terhadap lingkungan yang ada di negeri mereka sendiri, karena kenyataan menunjukkan dengan jelas bahwa proses industrialisasi yang telah sekian lama dilaksanakan oleh negara-negara maju serta pola konsumsi yang sudah sekian lama mereka nikmati itulah yang merupakan ancaman terbesar bagi lingkungan hidup umat manusia di seluruh dunia.

Dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup di dunia, kita berpendirian bahwa secara mutlak perlu dipercepat pembangunan negara-negara berkembang untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dunia. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, penanggulangan masalah lingkungan hanya akan berhasil apabila berhasil sepenuhnya mengatasi keterbelakangan yang merupakan sebab utama rusaknya lingkungan.

Faktor utama yang merusak hutan tropis di negara berkembang adalah keterbelakangan ekonomi negara berkembang, yang mengakibatkan rendahnya taraf hidup mereka. Karena itu untuk menyelamatkan lingkungan hidup, kita mengajak negara-negara maju untuk bersama-sama menggerakkan roda pembangunan negara-negara berkembang.

Khusus dalam pengelolaan hutan tropis, kita mengajak negara-negara maju untuk bersama-sama menanam pohon secara aktif untuk memperluas areal hutan tropis Indonesia sebanyak 20 juta hektar. Indonesia menyisihkan setiap tahun dana sebanyak 300 juta dolar Amerika Serikat untuk menanam hutan

kembali sebanyak 300.000 hektar setahun. Jika Indonesia mengerjakannya sendiri maka dibutuhkan waktu 65 tahun untuk meliputi 20 juta hektar ini. Karena itu kita mengajak negara-negara maju untuk memperpendek jangka waktu tersebut dengan jalan ikut serta aktif menanam hutan tropis di wilayah Tanah Air kita, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka ikut serta memelihara sehatnya paru-paru dunia.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Demikianlah, seperti saya katakan tadi, kita melihat bahwa REPELITA IV ternyata merupakan tahap pembangunan yang penuh hikmah. Tantangan-tantangan yang timbul justru makin mempertebal tekad kita dan makin menggugah kita untuk bekerja lebih keras lagi. Meskipun dalam suasana perekonomian dunia yang kurang menguntungkan, perekonomian Indonesia ternyata dapat tumbuh dengan memadai. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa seiring dengan itu, perekonomian Indonesia juga telah mampu mengembangkan dirinya ke arah struktur yang makin tangguh, makin seimbang dan makin siap menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Kebijakan pembaharuan ekonomi, termasuk langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi, ternyata mampu membangkitkan potensi-potensi pembangunan yang ada dalam masyarakat kita. Ekspor dan penerimaan dalam negeri yang berasal dari sumber-sumber non migas telah meningkat dengan pesat dan peranannya sebagai sumber devisa dan sumber penerimaan negara makin penting. Proses industrialisasi berjalan dengan mantap dan pasti. Sektor industri berkembang dengan pesat dengan dukungan sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya. Investasi dunia usaha juga telah bangkit dan memperkuat harapan bahwa is akan dapat menjalankan perannya seperti yang diharapkan di tahun-tahun mendatang. Ini semua memperkuat kerangka landasan yang telah kita bangun

bersama dalam REPELITA IV untuk menyongsong tahap tinggal landas nanti.

Dengan bekal itu semua, kita memasuki REPELITA V. Tugas-tugas yang kita hadapi tidak ringan. Taraf hidup dan kecerdasan rakyat harus terus kita tingkatkan. Kerangka landasan yang telah berhasil kita bangun dalam REPELITA IV perlu kita mantapkan, agar bangsa Indonesia siap untuk mulai memasuki proses tinggal landas dalam REPELITA VI nanti. GBHN memberi petunjuk pada kita bahwa partisipasi masyarakat serta kualitas manusia Indonesia merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan nasional. Kita juga menyadari bahwa prakarsa dan kreativitas masyarakat sendirilah yang merupakan kekuatan utama pembangunan di waktu-waktu mendatang. Sementara itu, dalam REPELITA V kita harus mampu pula menanggulangi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja kita yang terus bertambah. Upaya untuk memacu ekspor non migas, meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sumber-sumber non migas serta mendorong penanaman modal oleh dunia usaha dan pengerahan dana-dana masyarakat merupakan pekerjaan-pekerjaan yang telah kita laksanakan dalam REPELITA IV, yang perlu kita lanjutkan dan tingkatkan dalam REPELITA V.

Untuk itu semua kita perlu terus mengadakan pembaharuan dan penyegaran kelembagaan di berbagai bidang, termasuk langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi.

Kita juga harus terus menghilangkan kendala-kendala yang masih menghambat prakarsa dan kreativitas masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kita juga akan makin memantapkan peranan dan kemampuan negara dalam memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan, serta dalam mengawasi dan melaksanakan aturan permainan yang adil bagi semua warga negaranya. Setiap warga negara perlu memperoleh kesempatan yang sama dalam menyumbangkan kemampuannya bagi pembangunan dan dalam meman-

faatkan peluang-peluang yang timbul sebagai hasil dari pembangunan. Koperasi yang merupakan wadah yang tepat bagi pengembangan prakarsa, kreativitas dan partisipasi rakyat --terutama mereka yang berkedudukan ekonomi lemah-- wajib dan terus kita bangun, agar benar-benar dapat menjadi sokoguru perekonomian kita. Kita juga akan terus memperkuat peranan Pemerintah dalam melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, antara lain melalui penerapan sistem perpajakan yang adil dan progresif. Yang tidak kalah penting adalah, makin mempertajam prioritas agar program-program pembangunan makin mengarah pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak terbesar bagi rakyat banyak. Dalam hubungan ini, yang penting bagi kita sebenarnya bukan bagaimana memperluas peranan Pemerintah, tetapi bagaimana meningkatkan mutu peranan Pemerintah di bidang-bidang strategis itu, sejalan dengan makin luasnya kesempatan bagi warga negara untuk mengembangkan prakarsa dan kreativitasnya yang kini mulai bangkit.

Dalam setiap langkah, demokrasi ekonomi selalu menjadi pedoman kita.

Saudara Ketua yang saya hormati;

Pertanyaan kita yang mendasar adalah: apakah dengan keadaan perekonomian dan hasil-hasil pembangunan tadi kesejahteraan rakyat kita bertambah baik seperti yang menjadi cita-cita kemerdekaan, yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar dan digariskan oleh GBHN?

Jawabannya sangat membesarkan hati. Sebab, kesejahteraan rakyat itu memang telah bertambah baik, kehidupan masyarakat luas memang makin terangkat.

Banyak petunjuk mengenai bertambah baiknya tingkat kesejahteraan dan naiknya taraf kehidupan masyarakat luas itu.

Salah satu di antaranya yang penting adalah menurunnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Batas garis kemiskinan yang kita gunakan adalah besarnya pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan gizi sebesar 2.100 kalori setiap hari untuk setiap orang; ditambah dengan pengeluaran minimum untuk beberapa kebutuhan pokok di luar makanan, yaitu biaya untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan pengangkutan. Keluarga yang pengeluaran setiap anggota keluarganya di bawah batas tadi dimasukkan ke dalam golongan penduduk miskin, sedangkan yang berada di atas batas tadi dianggap sebagai golongan yang tidak miskin.

Dengan menggunakan ukuran itu, hasil survei Sensus Ekonomi Nasional sejak tahun 1976 memberi gambaran yang membesarkan hati. Dalam tahun 1976 itu ada 4 diantara 10 penduduk kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 1987 keadaannya jauh lebih baik : kurang dari 2 di antara 10 orang penduduk kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jika kita lihat dari jumlahnya, maka penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan turun dari 54 juta orang menjadi sekitar 30 juta orang. Ini berarti selama 11 tahun tidak kurang dari 24 juta orang yang berhasil mengangkat dirinya dan bebas dari kemiskinan, berkat pembangunan kita.

Apabila kita teliti lebih cermat lagi, gambaran hasil-hasil pembangunan itu makin membesarkan hati. Penduduk pedesaan ternyata dapat lebih cepat membebaskan diri dari kemiskinan dibanding dengan penduduk daerah perkotaan. Dalam masa 11 tahun tersebut penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun dari 40,4% menjadi 16,4%, sedangkan penduduk perkotaan menurun dari 38,8% menjadi 20,1% dari seluruh penduduk perkotaan. Jumlah orang miskin di daerah pedesaan menurun dari 44,2 juta orang menjadi 20,3 juta orang. Sedangkan jumlah orang miskin di daerah perkotaan belum menunjukkan penurunan secara berarti, dan sejak tahun 1981

justro sedikit meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya proses urbanisasi, ialah mengalirnya penduduk dari desa ke kota dan juga mekarnya wilayah perkotaan itu sendiri. Hal ini hendaknya menyadarkan kita semua, terutama Saudara-saudara kita yang hidup di pedesaan, bahwa hidup di kota belum tentu lebih baik jika dibanding dengan hidup di desa-desa yang dari hari ke hari makin bertambah maju itu. Perbaikan taraf hidup masyarakat pedesaan ini membuktikan keberhasilan pembangunan pertanian, proyek-proyek Inpres Desa, pemerataan pembangunan, gerakan PKK, pendidikan, pengabdian aparatur pedesaan, kesadaran masyarakat desa untuk membangun dan lain-lainnya.

Sesungguhnya perbaikan taraf hidup masyarakat kita lebih luas lagi dari petunjuk-petunjuk tadi. Angka-angka pengeluaran rumah tangga tidak dapat mengungkapkan seluruh proses pemerataan kebutuhan dasar yang sebenarnya telah terjadi sebagai hasil pembangunan.

Seperti saya kemukakan tadi, dewasa ini barang-barang kebutuhan pokok dan pelayanan dasar bagi masyarakat tersedia secara luas dan makin mudah diperoleh. Perkembangan ini juga merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan taraf kesejahteraan umum. Peningkatan yang pesat dari produksi pangan dan sandang, tersedianya secara luas berbagai kebutuhan hidup berkat meningkatnya produksi dalam negeri, meluasnya jangkauan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan dan perhubungan telah mengubah suasana secara mendasar. Jika dua dasawarsa yang lalu semua kebutuhan hidup dan pelayanan dasar serba langka sehingga hidup masyarakat kita dari hari ke hari terancam suasana kekawatiran, maka sekarang ada kepastian untuk memperoleh kebutuhan pokok dan pelayanan dasar. Semuanya itu mendatangkan perasaan lebih tenteram.

Jika pada tahun 1969 dahulu produksi tekstil kita dapat menyediakan 4 meter tekstil setiap tahun untuk setiap orang, maka pada tahun 1988 yang lalu telah naik dengan 5 kali lipat,

untuk beras naik dari lebih dari 107 kilogram untuk setiap orang setiap tahun menjadi lebih dari 161 kilogram, daging naik dari 2,7 kilogram menjadi 5,3 kilogram, telur naik dari 0,5 kilogram menjadi 2,7 kilogram, susu naik 0,3 liter menjadi 1,5 liter, ikan naik dari 10,7 kilogram menjadi 16,4 kilogram. Ketika mulai membangun dalam REPELITA I dahulu baru ada 4 orang dokter untuk melayani 100.000 penduduk, maka sekarang kita telah memiliki hampir 14 orang dokter yang melayani 100.000 penduduk. Untuk 100.000 penduduk itu jumlah Puskesmas juga naik dari sebuah menjadi 3 buah atau kadang-kadang lebih. Pada akhir REPELITA III dahulu 55% penduduk kita mendapat fasilitas air bersih, sedangkan pada akhir REPELITA IV yang baru lalu jumlahnya meningkat menjadi 65%. Jika pada tahun 80-an baru sekitar 280.000 rumah tangga yang mendapatkan listrik, sekarang telah naik berlipat ganda menjadi lebih dari 4,8 juta rumah tangga. Listrik juga terus masuk desa-desa kita, sehingga sekarang 1 diantara 3 desa telah diterangi oleh sinar listrik di malam hari. Panjang jalan juga bertambah dari 7,4 kilometer menjadi hampir 13 kilometer untuk 10 ribu penduduk. Jumlah bus-bus umum juga naik sekitar 10 kali lipat selama 4 REPELITA, sehingga sekarang tersedia sekitar 2 buah bus untuk 1.000 penduduk. Demikian gambaran sekilas mengenai bertambah baiknya penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat kita.

Unsur penting lainnya yang merupakan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah kestabilan harga. Harga barang-barang kebutuhan pokok yang relatif stabil mempunyai makna tersendiri bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya kemantapan harga, masyarakat dapat merencanakan pengeluaran mereka dengan lebih baik. Perasaan lebih tenteram juga meliputi hatinya, karena tidak dibayangi oleh ketidakpastian dan ketakutan adanya inflasi yang mengikis habis penghasilannya yang masih pas-pasan. Stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi, yang menjadi salah satu unsur dari Trilogi Pembangunan, tidak semata-mata

penting bagi perencanaan pembangunan ekonomi akan tetapi secara langsung juga merupakan unsur yang tidak kalah penting untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi rakyat.

Di samping makin banyak dan mudahnya memperoleh barang hasil produksi dalam negeri, mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat juga meningkat karena bertambah baiknya mutu barang produksi dalam negeri itu. Dengan makin beranekaragamnya produksi dalam negeri, masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk memilih barang yang dianggap terbaik bagi mereka. Kesempatan yang lebih luas untuk memilih, tentu lebih baik dari kesempatan pilihan yang terbatas.

Stabilitas politik yang dinamis dan keamanan yang terpelihara selama lebih dari dua dasawarsa terakhir ini, telah memberi rasa tenteram dan rasa aman dalam makna yang lebih mendasar. Hal ini pun telah meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti yang lebih luas lagi.

Dengan perasaan lega, kita dapat mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang cukup tinggi, telah dapat meningkatkan mutu kehidupan dan memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat.

Segala kemajuan tadi kita catat jauh dari rasa keangkuhan atau puas did. Kemajuan tadi adalah hasil kerja keras kita semua tanpa kecuali, disertai dengan pengorbanan-pengorbanan yang pada saat kita berikan dahulu terasa hampir-hampir tidak terpicul. Juga kadang-kadang, saya tahu, dengan rasa tidak sabar.

Karena itulah, dalam mencatat segala kemajuan tadi, rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pemurah, karena telah memberi ridho kepada bangsa kita dalam melewati cobaan-cobaan berat dan tantangan-tantangan besar di tahun-tahun yang lalu.

Kita menyadari bahwa kesejahteraan rakyat mempunyai pengertian yang dinamis. Keberhasilan pembangunan itu sendiri meningkatkan aspirasi masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan rakyat, muncul pula kebutuhan-ke-

butuhan baru. Apa yang dahulu tidak dianggap sebagai kebutuhan pokok dan tidak harus dipenuhi, sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai mutu yang memadai, sekarang telah menjadi mutu yang kurang memadai. Ini semua adalah perwujudan dari kemajuan. Ia adalah gejala yang wajar dalam masyarakat yang sedang membangun dan perlu ditampung dan disalurkan dengan baik.

Namun adanya peningkatan aspirasi ini kadang-kadang memberikan kesan bahwa, meskipun kita telah berusaha keras membangun, seolah-olah kita "berlari di tempat" atau tidak ada kemajuan. Kesan semacam ini tidak beralasan, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang tadi telah saya bentangkan.

Kita juga menyadari, bahwa kita tidak dapat sepenuhnya menghindari adanya sebagian dari warga masyarakat yang lebih berhasil daripada warga masyarakat yang lain dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru yang dibuka dan diciptakan oleh proses pembangunan. Perbedaan yang terlalu besar antara warga yang satu dengan warga yang lain melawan rasa keadilan rakyat dan, karena itu, perlu dihindari. Ini merupakan tugas negara. Langkah mendasar dalam menciptakan rasa keadilan masyarakat adalah mengembangkan iklim yang sehat, membuka kesempatan yang sama dan menegakkan aturan permainan yang adil bagi semua warga negara. Selanjutnya, dan tidak kalah pentingnya, kita perlu terus berusaha untuk mengurangi perbedaan kemampuan warga masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka oleh pembangunan. Dalam hal ini, peningkatan kualitas manusia dan pengembangan sumber daya manusia memegang peranan yang menentukan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Pada hari-hari kita memperingati 44 tahun Kemerdekaan Nasional, pada bulan-bulan pertama kita bertekad untuk mem-

perkuat landasan pembangunan bagi proses tinggal landas nanti, saya telah mengajak kita semua untuk membuat renungan mengenai keseluruhan perjalanan kita sebagai bangsa. Kita telah menengok ke belakang pada perjalanan pembangunan yang telah kita tempuh, melihat sekeliling tempat kita berada sekarang dan memandang jauh ke depan dalam perjalanan untuk mewujudkan cita-cita Kemerdekaan.

Kita terus melaksanakan tekad nasional untuk menempatkan pembangunan ekonomi itu pada prioritas yang tinggi, tanpa mengabaikan pembangunan bidang-bidang lain yang memang kita perhatikan dengan saksama. Sejak semula kita memusatkan perhatian yang sangat besar kepada pembangunan ekonomi ini, sebab kemajuan dan kesejahteraan bangsa yang kita cita-citakan hanya akan terwujud melalui pembangunan ekonomi. Tidak akan pernah ada kemajuan dan kesejahteraan, tidak akan pernah ada ketenteraman batin, tidak akan pernah ada keamanan, apabila keadaan perekonomian kita terbengkalai.

Jika kita menengok ke belakang, maka tampak kembali betapa panjangnya perjalanan yang telah kita tempuh dalam membangun bangsa ini. Jalannya pun tidak selamanya lurus dan mulus. Tidak sedikit halangan yang telah kita singkirkan, tidak kurang rintangan yang telah kita lampau, tidak terbilang pula ujian-ujian berat yang telah kita hadapi.

Kita bersyukur bahwa semuanya tadi telah kita lewati dengan selamat.

Pada saat-saat perekonomian kita mendapat tekanan-tekanan berat karena perkembangan ekonomi dunia yang tidak menguntungkan, kita telah berani mengambil langkah-langkah penyesuaian. Tidak jarang langkah penyesuaian itu terasa sangat berat dan menyakitkan pada waktu itu. Bersamaan dengan segala daya upaya untuk mengatasi tekanan-tekanan jangka pendek, kita juga menyiapkan diri untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan dalam jangka panjang. Semua kepahitan dan pengorban-

an itu ternyata tidak sia-sia. Sebab, pada saat terbukanya peluang untuk mengadakan terobosan ke depan, kita telah siap dan berhasil memanfaatkan sebaik-baiknya. Inilah barangkali pesan yang dikandung oleh pepatah lama yang sangat kita kenal : Bera- kit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

Itulah sebabnya, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengingatkan kita semua, jika kita mampu mengatasi ujian berat yang kita hadapi waktu itu, mudah-mudahan, kelak kita dapat mengatakan bahwa semua ujian dan tantangan berat itu adalah rahmat yang terselubung.

Kita telah membangun sistem politik yang mampu mem- bangkitkan dan menyalurkan semua aspirasi yang timbul dalam rangka melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, dengan tetap menjaga stabilitas nasional yang memberi ruang gerak bagi dinamika, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan tetap memperkuat ketahanan nasional.

Dalam pembangunan ekonomi, kita telah berhasil mencapai kemajuan-kemajuan yang sangat mendasar; terutama dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan menyiapkan kerangka landasan bagi tahap pembangunan selanjutnya, seperti yang diamanatkan oleh GBHN.

Semuanya itu telah membangkitkan rasa percaya diri, menambah tebalnya keyakinan kita, bahwa dalam REPELITA V ini, kita siap memperkuat kerangka landasan pembangunan yang telah kita bangun. Selanjutnya, dengan bekerja lebih keras lagi, dengan meningkatkan sikap tertib dan disiplin nasional, kita per- caya bahwa kita dapat mulai memasuki proses tinggal landas dalam melanjutkan pembangunan Negara Proklamasi kita yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
memberi segala taufik dan hidayahNya kepada kita semua.
Terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O